

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN TERHADAP JENJANG PENDIDIKAN NONFORMAL DI KABUPATEN MAMUJU UTARA

*(THE IMPLEMENTATION OF LITERACY EDUCATION POLICY ON NON
FORMAL EDUCATION LEVEL IN NORTH MAMUJU REGENCY)*

Muhammad Darwis

Abstrak

Judul penelitian ini adalah "*Implementasi Kebijakan Pendidikan Keaksaraan pada Jenjang Pendidikan Non Formal di Kabupaten Mamuju Utara*". Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Pendidikan Keaksaraan pada Jenjang Pendidikan Non Formal di Kabupaten Mamuju Utara. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn, dengan enam faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu : standar dan tujuan, sumber daya, komunikasi inter-organisasi dan aktivitas pelaksanaan, disposisi pelaksana, karakteristik badan pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi dan politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dan dengan pendekatan grounded theory. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive. Teknik analisis data menggunakan analisis model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pendidikan Keaksaraan pada Jenjang Pendidikan Non Formal di Kabupaten Mamuju Utara dengan pendekatan Akret (Aktif-Kreatif) berbasis *life skill* belum berhasil seperti yang diharapkan disebabkan oleh faktor-faktor standar dan tujuan yang belum jelas, sumber daya yang tersedia yang kurang memadai, sikap dan karakteristik organ pelaksana yang birokratis, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang belum memberikan kontribusi yang berarti. Adapun faktor lainnya yang paling berpengaruh adalah nilai-nilai terminal yang di yakini oleh para implementor, yang mengakibatkan lemahnya komitmen untuk mencapai tujuan Pendidikan penuntasan buta Aksara dengan efektif dan efisien, serta tujuan dasar yang bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat pedesaan di Kabupaten Mamuju Utara yang keberlanjutan pada kehidupan mereka. Namun demikian, seandainya para implementor memiliki nilai-nilai terminal yang konstruktif, komitmen yang kuat, dan tujuan yang konkrit, serta terciptanya komunikasi yang baik, maka implementasi kebijakan Pendidikan Keaksaraan pada Jenjang Pendidikan Non Formal di Kabupaten Mamuju Utara akan dicapai dengan efektif dan berhasil. Oleh karena itu, efektifitas implementasi kebijakan pendidikan keaksaraan pada organisasi yang besar yang melibatkan beberapa satuan pelaksana memerlukan komitmen yang kuat dan komunikasi yang baik para implementor.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pendidikan Keaksaraan, Akret dan, life skill.

Abstract

The problem in this research is how the implementation of Literacy Education on policy Non Formal Education Level in North Mamuju Regency. This research uses the theory of policy implementation from Van Meter and Van Horn, with six factors that influence the implementation are: standards and objectives, resources, inter-organizational communication and implementation activities, implementing dispositions, implementing agency characteristics, and sosial, economic and political conditions. The method used in this research is qualitative method with descriptive research type, and with approach of grounded theory. Techniques of collecting data through interviews, observation, and documentation. Informants in this study were determined purposively. The data analysis technique uses interactive model analysis from Miles and Huberman. The results showed that the implementation of the policy of Literacy Education at Non Formal Education Level in Kabupaten Mamuju Utara with Akret (Active-Creative) approach based on life skill has not been successful as expected caused by unclear standard and objective factors, available resources which Inadequate, attitudes and characteristics of bureaucratic implementing organs, poor communication, and economic, sosial and political environmental conditions that have not contributed significantly. The other most influential factors are terminal values that are believed by the implementors, resulting in a weak commitment to achieve the goal of blindness education literacy effectively and efficiently, as well as meaningful and beneficial basic objectives for rural communities in the sustainable North Mamuju Regency On their lives. However, if the implementors have constructive terminal values, strong commitment, concrete goals, and good communication, then the implementation of the Literacy Education policy at the Non Formal Education Level in North Mamuju Regency will be achieved effectively and successfully. Therefore, the effectiveness of the implementation of literacy education policy in large organizations involving several implementing units requires strong commitment and good communication of the implementors.

Keywords: *Policy Implementation, Literacy Education, Acknowledgments and life skills*

PENDAHULUAN

Masyarakat yang memiliki kecakapan hidup (Life skill) dan masyarakat yang aktif dan kreatif adalah bentuk pemberdayaan masyarakat yang menjadi suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengaturan masyarakat. Tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengatur masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebuah konsep pembangunan ekonomi termasuk nilai-nilai sosial dan dimungkinkan pula penanaman nilai-nilai budaya maju; seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan bertanggung jawaban. Proses pemberdayaan seperti ini merupakan paradigma baru dalam pembangunan manusia seutuhnya dan berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat pascakeaksaraan fungsional adalah upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bidang pengetahuan, sikap dan keterampilan, sehingga masyarakat mampu menunjukkan eksistensinya dan dapat berpartisipasi serta memperbaiki kedudukannya dalam masyarakat. Proses partisipatif yang berkelanjutan di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok belajar berusaha, berbagi pengetahuan dan pengalaman serta adanya perubahan sikap berusaha untuk mencapai tujuan bersama.

Program pemberantasan buta aksara dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan, baik dari segi jumlah anggaran yang diluncurkan, maupun dari segi jumlah capaian warga belajar yang dilibatkan dalam program pembelajaran. Penduduk buta aksara di Indonesia pada tahun 2012 usia 15 – 59 tahun berjumlah 6,401,522 orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar

tinggal di daerah pedesaan seperti buruh tani, buruh serabutan, nelayan dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur yang pada umumnya adalah kaum urban. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan dan sikap mental inovatif dan pembangunan.

Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang mendukung untuk memperoleh gambaran kehidupan yang lebih luas sangat terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai. Penuntasan keaksaraan fungsional merupakan kewajiban semua pihak dalam peningkatan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), masyarakat buta aksara sangat memerlukan sentuhan pendidikan. Program pemberantasan buta aksara dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan, baik dari segi jumlah anggaran yang diluncurkan, maupun dari segi jumlah capaian warga belajar yang dilibatkan dalam program pembelajaran. Seperti diketahui, bahwa data Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat angka buta huruf menunjukkan berkisar berjumlah sekitar 6,478 orang (18.43 %) dari jumlah penduduk 119,406 jiwa. Dan telah berhasil mendapatkan SUKMA (surat keterangan melek aksara) atau yang terbebas dari buta aksara Tahun 2015-2016 sebanyak 1.250 orang.

Keberhasilan yang dicapai dalam perluasan akses pendidikan keaksaraan sesungguhnya merupakan bentuk usaha yang seharusnya dihargai. Keberhasilan penyelenggaraan keaksaraan fungsional memang menunjukkan hasil, dengan semakin menurunnya persentase jumlah buta aksara setiap tahunnya. Akan tetapi dari segi keberlanjutan keaksaraan fungsional ini belum ada tindak lanjut, kemanfaatan bagi masyarakat dirasakan kurang. Akibatnya ada sebagian masyarakat yang telah memperoleh SUKMA (surat keterangan melek aksara) kembali mejadi buta huruf. Diakibatkan para implementor kurang memiliki nilai-nilai terminal yang konstruktif, komitmen yang kuat, dan tujuan yang konkrit, serta terciptanya komunikasi yang baik, akhirnya implementasi kebijakan Pendidikan Keaksaraan pada Jenjang Pendidikan Non Formal di Kabupaten Mamuju Utara tidak dapat dicapai dengan efektif.

Mengacu dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana pemberdayaan masyarakat, menciptakan masyarakat yang aktif dan termitivasi dalam meningkatkan kemampuannya melalui implemementasi kebijakan keaksaraan fungsional melalui partisipasi aktif dari para penggiat pendidikan, maupun para pengambil kebijakan.

Untuk mencapai tujuan umum tersebut, secara khusus dirinci ke dalam sebuah variabel-variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan penanganan buta aksara di Kabupaten Mamuju Utara berikut: (a) membangun komunikasi yang lebih intens untuk memperoleh gambaran pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kecakapan hidup (life Skill) keaksaraan fungsional untuk meningkatkan taraf hidup, (b) mendeskripsikan ketercapaian pemberdayaan masyarakat keaksaraan fungsional melalui informasi dan kebijakan yang lebih berpihak untuk meningkatkan taraf hidup, (c) mempersiapkan sumberdaya sebagai bentuk fasilitas dalam menuntaskan buta aksara dan untuk meningkatkan taraf hidup.(d) membangun struktur lembaga pengelola penuntasan buta aksara dengan melibatkan sektor-sektor yang terkait termasuk masyarakat.

PEMBAHASAN

Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) memiliki pengertian menunjuk kepada kemampuan seseorang, memiliki kecakapan hidup (life skill) dan kreatif, khususnya kelompok rentan atau lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (1) memenuhi keperluan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) dalam arti bukan hanya bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, (2) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya, (3) mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2010).

Strategi pemberdayaan menurut (Ife; 2008) ada tiga strategi dasar pemberdayaan yaitu: (1) Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan, dilakukan dengan mengubah struktur dan

lembaga-lembaga yang ada agar terjadi akses yang sesuai dengan sumber-sumber dan layanan-layanan, serta munculnya partisipasi dalam kehidupan masyarakat, (2) pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik, menekankan kepada pentingnya perjuangan dan perubahan politik untuk meningkatkan keberdayaan yang lebih efektif, di mana masyarakat dapat dilibatkan untuk melakukan aksi-aksi langsung. (3) pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadaran, menekankan pada pentingnya proses pendidikan, sehingga pihak yang diberdayakan memperoleh kemampuan-kemampuan. Cara ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan akan berbagai hal yang menjadi kendala baik struktural maupun kendala-kendala kemasyarakatan, juga memberikan keterampilan untuk berkarya secara efektif untuk menuju perubahan.

Pemberdayaan adalah merupakan suatu konsep yang sangat berorientasi kepada kepentingan publik, lebih mendorong dan mengutamakan kemampuan masyarakat serta memberikan dan memfasilitasi keperluan publik untuk meningkatkan kemampuannya (policy for publik), (Keban: 5: 2008).

Dengan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan tadi jika dapat diterapkan dalam upaya pemberdayaan masyarakat akan dapat berjalan dengan baik karena prinsip pemberdayaan adalah merupakan proses kolaborasi antara pemerintah, pekerja sosial dan masyarakat sebagai yang diberdayakan, pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai subjek yang kompeten. Masyarakat harus mampu melihat dirinya sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan dalam kelompok masyarakatnya.

Implementasi Program Keaksaraan Fungsional (KF), mengatasi permasalahan yang terkait dengan pemberantasan buta aksara dan pemberian keterampilan bagi warga belajar atau peserta didiknya. Keaksaraan fungsional terdiri dari dua unsur, yaitu keaksaraan secara sederhana diartikan sebagai kemampuan untuk membaca, menulis, dan menghitung. Seseorang yang buta aksara adalah orang yang tidak dapat membaca, menulis dan berhitung dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang melek huruf adalah orang yang dapat membaca maupun menulis kalimat sederhana dan berhitung. Sedangkan fungsional berkaitan erat dengan fungsi dan tujuan dilakukannya pembelajaran di dalam pendidikan keaksaraan, serta adanya jaminan bahwa hasil belajarnya benar-benar bermakna dan bermanfaat untuk meningkatkan mutu kehidupan. Fungsional juga bermakna warga belajar dapat memanfaatkan hasil belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan keaksaraan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. (Napitupulu, 1998:4)

UNESCO mendefinisikan keberaksaraan sebagai *“a continuum of learning that enables individuals to develop their knowledge and potential, pursue and achieve their goals, and participate fully in society”* (Keberaksaraan merupakan kontinum pembelajaran sehingga individu-individu mampu mengembangkan pengetahuan dan potensi dirinya, mengejar dan mencapai tujuan yang ingin diraihinya, dan turut serta sepenuhnya dalam kegiatan masyarakat). Kelompok belajar usaha adalah menumbuhkembangkan semangat berwirausaha bagi warga masyarakat yang tidak memiliki keterampilan tetapi mempunyai semangat untuk mengubah nasibnya dengan memanfaatkan peluang-peluang yang difasilitasi oleh pemerintah secara maksimal. Dengan semakin berkembangnya KBU diharapkan akan muncul para usahawan-usahawan kecil yang mampu meningkatkan taraf hidup di tingkat local dan bahkan nasional.

Observasi di lapangan, diperoleh kesan sejak masyarakat, bahwa program pendidikan keaksaraan belum juga menampakkan tanda-tanda perubahan sikap, maupun motivasi untuk mencoba melakukan aksi. Output terwujudnya keberdayaan masyarakat masih jauh dari harapan. Tingkat percaya diri masyarakat pendidikan keaksaraan masih rendah, nampak hanya berdiam diri atau malah ngobrol yang tidak ada manfaatnya.

Berdasarkan wawancara, di Kabupaten Mamuju Utara sebagian besar belum mengetahui manfaat program KF diikuti, setelah memperoleh selebar kertas yang bertuliskan SUKMA, mereka merasakan kurang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang mengetahui, kebanyakan menyadari bahwa keaksaraan fungsional merupakan keperluan, apalagi sekarang

dibentuk kelompok belajar usaha (KBU). Usahanya dalam bidang masakan kuliner berbahan baku lokal serta keterampilan lainnya.

Responden mengatakan sangat bermanfaat, saya dapat membaca resep-resep masakan kuliner baru. Untuk memperkaya variasi resep-resep masakan kuliner. Dapat membaca macam-macam resep yang baru baik dari majalah maupun koran yang tersedia di taman bacaan masyarakat. Manfaat mengikuti KF, hasil identifikasi sebagian besar menyatakan bahwa setelah mengikuti KF dan membentuk KBU sangat bermanfaat dapat mengembangkan atau membuat resep masakan baru, semakin lancar pula dalam membaca, semakin mudah memperoleh informasi yang diperlukan. Dari 20 orang yang diwawancarai menyatakan memiliki kemauan dan kemampuan/keberdayaannya dalam mengikuti KBU, dengan beberapa alternatif jawaban kebermanfaatannya telah memiliki ijazah SUKMA.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa dari 20 orang yang berhasil diwawancarai, hanya ada 2 orang yang menyatakan bahwa pasca KF kurang bermanfaat dalam KBU, sedangkan 9 orang menyatakan pasca KF bermanfaat dalam KBU, dan 9 orang lagi menyatakan pasca KF sangat bermanfaat dalam KBU. Berdasarkan hasil analisis tersebut nampak sebagian besar menyatakan bahwa pasca keaksaraan fungsional besar manfaatnya dalam kelompok belajar usaha. Kegiatan kelompok belajar usaha fasilitator lebih banyak menggunakan pendekatan orang dewasa, responden merasa pendapat, ide dan lainnya dihargai. Fasilitator memotivasi bahwa masyarakat memiliki potensi, dengan demikian masyarakat memiliki kekuatan/berdaya untuk berusaha, dan percaya diri. Penuturan reponden dengan metode diskusi, tanya jawab suasana kekeluargaan menjadikan KBU nyaman dan harmonis.

Dengan melihat antusias dari masyarakat dalam pengembangan dirinya, menurut Edward III (1980) ada empat indikator yang dapat mewujudkan perhatian pemerintah terhadap kepentingan masyarakat terkait dengan kebijakan yaitu, komunikasi: sebaiknya pemerintah melalui dinas terkait mampu menerjemahkan dan mensosialisasikan program keaksaraan tersebut. Sumberdaya: ada dua sumberdaya yang dapat menunjang keberhasilan pendidikan keaksaraan di Kabupaten Mamuju Utara yaitu, Sumberdaya Manusia serta sarana dan prasarana. Sikap pelaksana, tentang pengambilan kebijakan dan tindaklanjut dari regulasi yang sudah ditetapkan. Struktur birokrasi: penataan struktur pengelola keaksaraan baik ditingkat pemerintah maupun dimasyarakat.

Membangun komunikasi, melakukan sosialisasi program serta melakukan pendekatan adalah bentuk motivasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat dan dikembangkannya kemampuan yang telah ada pada dirinya. Langkah berikutnya adalah menumbuhkan keyakinan dalam diri (manusia itu sendiri) untuk melakukan kegiatan atau tindakan, belajar dan melatih keterampilan yang diperlukannya untuk keperluan hidupnya. Jumlah masyarakat pasca KF 20 orang yang tergabung dalam KBU, selebihnya kembali pada kehidupan sehari-hari, mereka beranggapan bahwa KF tidak ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, hanya membuang-buang waktu saja, antisifasinya adalah membangun komunikasi.

Karena sasaran pemberdayaan masyarakat KF orang dewasa, di mana orang dewasa termotivasi untuk belajar karena mereka mengalami keperluan dan kepentingan bahwa belajar akan memuaskan, hal ini merupakan titik awal yang tepat untuk mengatur kegiatan pembelajaran orang dewasa. Orientasi orang dewasa untuk belajar adalah hidup yang berpusat; oleh karena itu, unit yang sesuai untuk mengorganisir pembelajaran orang dewasa adalah situasi hidup, bukan mata pelajarannya; pengalaman orang dewasa merupakan sumber daya terkaya untuk belajar bagi orang dewasa, karena itu, metodologi inti dari pendidikan orang dewasa adalah analisis pengalaman. Orang dewasa memiliki keperluan yang mendalam untuk mengarahkan diri, mengendalikan emosi dirinya, maka keterlibatan tutor diperlukan dalam proses pembelajaran orang dewasa. Hal ini sesuai dengan pendapat Knowles (2005:40), bahwa (a) *adults are motivated to learn as they experience needs and interest that learning will satisfy*, (b) *adults' orientation to learning is life-centered*, (c) *experience is the richest source for adult's learning*, (d) *adults have a deep need to be self-directing*, dan (e) *individual differences among people increase with age*.

Ketercapaian kemampuan dan pemberdayaan masyarakat melalui program keaksaraan fungsional untuk meningkatkan taraf hidup, tidak terlepas dari Sumberdaya manusia dan sara penunjang dalam kegiatan. Sumberdaya manusia di antaranya Staf pengelola, Pamong belajar, dan Tutor Keaksaraan, sedangkan sarannya seperti Buku bahan bacaan serta bahan peraga sebagai metode pembelajaran.

Pada setiap proses pendidikan keaksaraan dituntut penguatan masyarakat dalam peningkatan kapasitas, kemandirian dan kreatifitas dalam mengelola berbagai kegiatan. Pelaksanaan proses penuntasan buta aksara masyarakat desa tidak dapat dilakukan secara temporal namun perlu berkelanjutan. Pendidikan keaksaraan masyarakat berbasis muatan lokal, pada dasarnya pemberdayaan masyarakat dapat berdaya dengan dukungan muatan lokal atau sumber daya alam seperti: lingkungan yang subur, tanaman singkong, ternak kambing dan sebagainya. Hasil tani dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau bahkan menjadi barang siap konsumsi. Barang yang semula tidak bernilai menjadi bernilai, dari yang tidak memerlukan sumber daya manusia menjadi memerlukan. Sependapat, (Wahyudin.U; 2012: 64): keberdayaan masyarakat miskin di pedesaan akan bertambah kuat dengan cara menciptakan perubahan kreatif yang berarti dari tidak bernilai menjadi bernilai, menghasilkan sebuah produk akhir yang memiliki nilai pasar, mampu memulai dari nol dan yang dianggap tidak berharga.

Kerja keras untuk dapat mencapai kemandirian usaha. Masyarakat proaktif, yaitu selalu ada inisiatif, kerja keras dan tegas dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Suryana (2006:66) menyatakan: Untuk mencapai keberhasilan dan kemandirian usaha yang dimiliki sendiri, sangatlah tergantung pada: (1) *individual skill and attitudes*, (2) *knowledge of business*, (3) *establishment of goal*, (4) *take advantage of the opportunities*, (5) *adapt to change*, and, (6) *minimize the threats to business*. Kelompok belajar. Masyarakat yang dididik berangsur-angsur memiliki keterampilan, pengetahuan bisnis, dapat meminimalisir hambatan berbisnis.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara sebagai pengambil kebijakan dalam pelaksanaan kewajiban memberikan pelayanan publik ini, aparaturnya birokrasi dituntut adanya kepekaan (*responsiveness*) terhadap kepentingan publik dan bertanggung jawab (*responsibility*) dalam pelaksanaan tugas serta produk layanannya sesuai dengan tuntutan publik (*representativeness*). Hal ini dapat terwujud apabila dilakukan perubahan sikap dan karakter aparaturnya birokrasi secara mendasar, sebagaimana yang menjadi suatu agenda reformasi yang menuntut terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*). Penyelenggaraan pemerintah yang dimaksud adalah diperlukan pelaku birokrasi yang profesional, melaksanakan tugas dilandaskan pada landasan normatif dan kepatutan sebagai etika yang mengendalikan setiap langkah pelaksanaan tugas, wewenang maupun kekuasaan yang dipercayakan kepadanya, melalui Pendidikan keaksaraan Fungsional (KPF) Agar dampak dari pendidikan Keaksaraan untuk pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Melalui KF telah mampu menghadapi permasalahan usahanya, mampu berembung/ diskusi dengan bekal pengalamannya selama mengikuti KF, masyarakat merasakan manfaat dari KF; menyadari akan pentingnya informasi, pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam kehidupan; serta menyadari sebagai keperluan untuk tetap belajar. Dampak KF pada individu memperoleh penghasilan tambahan, bahkan ada yang semula tidak punya pendapatan, kini punya pendapatan. Ketercapaian pemberdayaan masyarakat bukan saja berdampak pada individu, tetapi pada kelompok bahkan pada masyarakat secara umum. Secara internal keberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh individu, seperti; melek huruf/ berpendidikan, toleransi, nilai-nilai, pendidikan maupun pengalaman. Sedangkan faktor yang berasal dari luar individu seperti model peran, aktivitas dan peluang. Oleh karena itu, inovasi dapat berkembang menjadi usaha mandiri melalui proses yang panjang, dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, organisasi dan keluarga.

Dampak perubahan sosial yang menyangkut kedekatan atau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya gerakan/perubahan ekonomi, maka kemampuan individu "senasib" untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif. Hal tersebut dicapai melalui proses dialog dan diskusi di dalam kelompoknya,

yaitu individu dalam kelompok belajar usaha untuk mendiskripsikan suatu situasi, kondisi kelompoknya, mendiskripsikan permasalahan yang terjadi dalam kelompok untuk selanjutnya mencari solusi.

Dampak lain dari pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan keaksaraan (a) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi keperluankeperluan hidup sehari-hari, ditandai dengan meningkatnya pendapatan, meningkatkan kualitas pangan, sandang, kesehatan dan tingkat pendidikan; (b) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam keluarganya maupun dalam lingkungan sosial; (c) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menampilkan peranan-peranan sosialnya. Keberdayaan ini tampak dalam sikap mental kewirausahaan dan kemandirian.

KESIMPULAN

Adapun faktor lainnya yang paling berpengaruh adalah nilai-nilai terminal yang diyakini oleh para implementor, yang mengakibatkan lemahnya komitmen untuk mencapai tujuan Pendidikan penuntasan buta Aksara dengan efektif dan efisien, serta tujuan dasar yang bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat pedesaan di Kabupaten Mamuju Utara yang keberlanjutan pada kehidupan mereka, sedangkan sumber daya yang tersedia yang kurang memadai, sikap dan karakteristik agen pelaksana yang birokratis, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik,

Gambaran pemberdayaan masyarakat pendidikan keaksaraan fungsional melalui KBU untuk meningkatkan taraf hidup. Dengan pendekatan orang dewasa, masyarakat diakui keberadaannya sebagai orang yang memiliki potensi. Adanya perubahan sikap pada masyarakat KF setelah bergabung dengan KBU. *Kedua*, ketercapaian pemberdayaan masyarakat pasca keaksaraan fungsional melalui KBU untuk meningkatkan taraf hidup. Masyarakat proaktif, yaitu selalu ada inisiatif, kerja keras dan tegas dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Dampak pemberdayaan masyarakat yang mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional melalui KBU untuk meningkatkan taraf hidup. Adanya perubahan sikap, perubahan sosial, meningkatnya pendapatan, meningkatkan kualitas pangan, sandang, kesehatan dan tingkat pendidikan.

RUJUKAN

- Edward III, George C. 1980. *Implementing Publik Policy*. Washington: Congressional Quarterly press.
- Ife, J dan Tesoriero, F. 2008. *Alternatif pembangunan masyarakat di era Globalisasi: Community Development*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Keban, T. Yeremis. 2008. *Enam dimensi Strategis Administrasi Publik :Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media
- Knowles, M. S. 2005. *The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and human Resource Development*, Sixth Edition. Oxford, UK: Elsevier.
- Napitupulu, 1998. *Pendidikan Luar Sekolah Dan Pendidikan Kedewasaan*. Jakarta: Depdikbud
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung : Refika Aditama
- Suryana, Agus. 2006. *Panduan Praktis Mengelola Pelatihan*. Jakarta: Edsa Mahkota.
- Wahyudin, Uyu, 2012. Pelatihan kewirausahaan berlatar ekokultural untuk pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan, *MIMBAR Jurnal sosial dan pembangunan* 28(1): 55-64.

Muhammad Darwis
 Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana
 Universitas Tadulako
 Email: ddanggangjunior@gmail.com